POTRET SUBORDINASI PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN

Agus Eko Surjanto*

Abstrak

The curriculum, both in religious and secular educations, generally tends to emphasize men's role in public spheres and highlights women's role in domestic arena. The content of curriculum, for instant, contains gender biased pictures, sentences or illustrations. The curriculum in religious education is also similar: there is an obvious tendency to maintain gender bias due to the authors' conviction that the books they refer to (fiqih books) are sacred, already final and unchangeable. Religious text books, thus, tend to maintain women subordination. In order to develop gender sensitive religious understanding, then, there is a need to revise religious text books that include gender bias. The revision is important because this gender biased religious understanding has become common understanding in society. This is because Muslim society attempt to understand their religious teachings dogmatically. They do not use a critical approach in understanding religious norms particularly the ones they accommodate in the text books related to women's status and role.

Kata Kunci: Buku Ajar, Pendidikan Islam & Bias Gender

I. Pendahuluan

Dewasa ini telah terjadi banyak ketimpangan gender di masyarakat yang diasumsikan muncul karena terdapat bias gender dalam pendidikan termasuk pendidikan agama. Di antara aspek yang menunjukkan adanya bias gender dalam pendidikan dapat dilihat pada perumusan kurikulum.

^{*} Dosen STAIN Tulung Agung

¹ Sebagaimana hal itu bisa dilihat dalam materi-materi misalkan fiqih, Ibadah Syari'ah dan lain-lain. Banyak contoh mengenai bias jender yang ada pada buku bahan ajar agama Islam. Seperti halnya keterangan bahwa "Iman kepada Rasul-rasul Allah,"

Implementasi kurikulum pendidikan sendiri terdapat dalam buku ajar yang digunakan di sekolah-sekolah. Realitas yang ada, dalam kurikulum pendidikan (agama ataupun umum) masih terdapat banyak hal yang menonjolkan laki-laki berada pada sektor publik sementara perempuan berada pada sektor domestik.²

Dengan kata lain, kurikulum yang memuat bahan ajar bagi siswa belum bernuansa netral gender baik dalam gambar ataupun ilustrasi kalimat yang dipakai dalam penjelasan materi. Demikian halnya dalam kurikulum agama, sebagai contoh dalam materi fiqh tentang kewajiban menjadi imam dalam salat berjama'ah, ketentuan poligami, fungsi suamiistri dalam *munakahat* serta perbedaan bagian anak laki-laki dan perempuan dalam *mawarits* yang banyak mengandung bias gender. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan dalil-dalil (argumen hukum) yang diambil sebagai rujukan berasal dari kita-kitab klasik yang penuh dengan budaya patriarkhi.³

dijelaskan bahwa "pengertian Nabi ialah seorang manusia biasa (laki-laki) yang menerima wahyu dari Allah Swt. Untuk dirinya sendiri. Rasul ialah seorang manusia biasa (laki-laki) yang diutus oleh Allah dan menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya". Selain itu, dalam buku-buku ajar agama Islam baik untuk SD ataupun MI kelas 1-3, kisah-kisah Nabi dan Rasul diceritakan hanya kisah Nabi dan Rasul dari kaum laki-laki saja. Hal senada juga dapat dilihat pada tema profil tokoh di dalam buku ajar SMP kelas 3 terbitan Ganeca juga pada tema sepenggal kisah atau kisah Islami dalam buku ajar SD Kelas 1-6 terbitan Erlangga. Di dalam dua buku terakhir terdapat profil tokoh yang dikisahkan lebih banyak pada gambaran ketokohan dan ketauladanan seorang laki-laki dibandingkan perempuan.

² Sepanjang sejarah, perempuan mengalami penindasan. Penindasan terhadap perempuan merupakan pengalaman seksisme sebagai sebuah sistem dominasi (Maggie Humm). Dominasi dari budaya patriarkhi yang menempatkan laki-laki sebagai pusat (phaluss). Sejarah penindasan terhadap perempuan tak kunjung reda sampai hari ini. Bentuknya bahkan semakin beragam. Globalisasi memiliki narasi besar (grand narrative) egalitarianisme, emansipasi, liberasi. Narasi besar itu hanyalah cerita palsu belaka (psudeo universality). Globalisasi bagi kaum perempuan semakin memperlebar ruang eksploitasi, dan semakin memperdalam kuasa patriarkhi.

³ Banyak sekali kitab-kitab fiqih yang sampai saat ini tertata rapi di Perpustakaan baik yang ada di Perpustakaan UIN, IAIN, STAIN, dan beberapa perpustakaan PonPes yang dari kesemua kitab-kitab tersebut sarat akan dominasi laki-laki. Baik pengarangnya, layouter, bahkan isi yang ada pada kitab-kitab tersebut yang selama ini disakralkan.

Selain itu semakin mengentalnya kecenderungan bias gender ini dikarenakan para penulis buku menganggap kitab fiqh yang menjadi rujukkannya sebagai sesuatu yang final, sakral tidak bisa diubah. Realitas ini jelas akan menghantar pada gambaran sosok perempuan yang lemah secara fisik dan psikis dibandingkan laki-laki. Akhirnya, citra perempuan dengan berbagai aspek negatifnya, mendarah daging seiring sejalan dengan sejarah manusia dan kemanusiaan itu sendiri.

Tentu dengan demikian, sebenarnya menurut penulis, banyak persoalan yang dari dulu sampai saat ini cenderung mempunyai kasuistik sama yaitu tidak adanya upaya pemberdayaan peran perempuan di berbagai sektor kehidupan termasuk dalam sektor pendidikan yang mungkin saja dari hal itulah saat ini banyak ditemukan berbagai bahan ajar pendidikan agama Islam yang terlalu bias gender. Karena itulah, persoalan itu diurai dalam tulisan ini yang mengfokuskan pembahasannya pada bias gender dalam bahan ajar materi agama Islam.

II. Pendidikan dan Keberpihakan Perempuan

Pendidikan yang selama ini dianggap sebagai sumber kebajikan, ternyata telah menjadi penindas yang ulung. Pendidikan yang pada umumnya diyakini memiliki misi umum untuk mencerdaskan bangsa ternyata malah berperan aktif mengkerdilkan anak didik dengan membuat mereka menjadi tidak humanis. Pendidikan yang selama ini dipercaya memiliki tugas untuk membukakan pikiran dan nurani manusia akan berbagai kesadaran palsu yang tumbuh dalam masyarakat justeru turut

Nyaris menakutkan kehadiran Islam dewasa ini ditumpangi adanya ajaran-ajaran tidak jelas dalam bentuk masih berlangsungnya budaya-budaya patriarkhi.

⁴ Padahal pada dasarnya Islam mendukung pendidikan perempuan dalam wilayah agama, sosial maupun politik. Islam tidak mengenal prioritas bagi laki-laki di atas perempuan sehubungan dengan hak pendidikan. Laki-laki dan perempuan sama didukung untuk memperoleh pendidikan, bahkan dinyatakan Nabi dari semenjak di ayunan sampai masuk liang lahat. Semua ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pendidikan dan yang menganjurkan untuk menuntut Ilmu pengetahuanpun ditujukan secara setara baik kepada laki-laki maupun perempuan. Perhatian Nabi SAW terhadap pendidikan kaum perempuan merupakan manifestasi dari kenyataan bahwa beliau sendiri biasa mengajar perempuan bersama laki-laki.

serta menjadi pencipta kesadaran-kesadaran palsu sendiri dan menjadi pengekang kebebebasan, dengan cara-caranya yang terselubung.

Persoalan yang demikian tentu bisa dirasakan jika perenungan demi perenungan dilakukan oleh seluruh komponen anak bangsa. Pendidikan yang termasuk salah satu pranata sosial yang paling bertanggung jawab malah terlihat melestarikan ketimpangan-ketimpangan gender. Ketimpangan tersebut ternyata bisa didapati sumbernya yang selama ini ternyata jarang ditelaah. Sumber tersebut adalah adanya materi pengajaran agama yang ternyata masih menyimpan ajaran yang cenderung patriarkhis. Materimateri tersebut yang selama ini dijadikan sebagai bahan ajar tentunya harus dikaji ulang dan disusun kembali agar ketimpangan-ketimpangan tidak lagi terjadi.

Jika dibandingkan dengan al-Qur'an, lebih banyak teks-teks hadis yang dimaknai oleh ulama dengan cara yang timpang dan tidak adil dalam kaitannya dengan relasi laki-laki dan perempuan. Dari sebagian teks-teks hadis, dapat diketahui ajaran seperti bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok, perempuan adalah fitnah, kurang akal dan kurang agama, sebagai penghuni neraka terbanyak, tidak layak menjadi pemimpin, tidak sah mengawinkan dirinya, tidak sah menjadi saksi, tidak boleh ke masjid jika dalam keadaan haidl atau menstruasi⁵ bahkan ada teks yang menyatakan bahwa perempuan adalah sumber kesialan.

Pemaknaan terhadap teks-teks hadis seperti ini yang mungkin saja dijadikan referensi dalam menyusun bahan ajar pendidikan agama Islam

⁵ Keadaan haid atau yang kebanyakan dikenal sebagai menstruasi, banyak disingung-singgung sebagai halangan bagi kaum perempuan. Ada yang menyebutnya kotor, jijik, nanti menetes, atau disebut sebagai hukuman Tuhan atau perkataan-perkataan lain yang terkesan memberikan stereotyp kepada perempuan. Padahal jika diteliti lebih lanjut, hal itu tiada lain karena model interpretasi terhadap teks keagamaan saja yang masih terkungkung akan radiasi kultur patriarkhi dan pada akhirnya tiada mufassir yang berani memberikan tafsir ulang atas redaksi al-Qur'an maupun al-hadis yang terkesan bias jender. Baca; Mustofa, "Reinterpretasi Menstrual Taboo dalam Al-Qur'an: Menggagas Fiqih Egalitas-Humanis", dalam Jumal Musawa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 5, No. 1, Januari 2007, 62-73.

selama ini harus dikaji ulang. Bahkan jika ditemukan sebagian di antara dalil-dalil hadis Nabi yang ternyata memiliki sanad lemah, tentu harus dipikir ulang.

Pendidikan adalah hak setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada yang namanya pendidikan hanya diwajibkan kepada kaum laki-laki. Itulah mengapa dalam bahasa hadis Nabi dikatakan bahwa: "Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah" (Riwayat Ibn Majah, al-Baihaqi dan Ibn Abd al-Barr). Karena itu setiap manusia yang hidup baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan pendidikan.6

Tentu dengan demikian, sudah dari dulu ajaran agama Islam memberikan semangat keadilan akan kesetaraan gender. Namun jarang umat Islam dewasa ini yang benar-benar memahami spirit keadilan yang ada dalam Islam sebagaimana masih banyaknya uraian bias gender dalam materi yang ada di bahan ajar pendidikan agama Islam. Buku atau bahan ajar pendidikan agama Islam selama ini terdeteksi mempunyai radiasi bias jender yang kuat. Terutama materi-materi hukum Islam.

Itulah mengapa banyak bahan ajar agama Islam yang cenderung tidak berpihak kepada kaum perempuan. Banyak dari kaum perempuan atau dengan bahasa lain simbol perempuan yang ada di beberapa buku ajar

agama cenderung disubordinat.⁷ Padahal jika direnungkan tanpa atau tidak dilihat dari bahan ajar materi agama Islam, perempuan di Indonesia bahkan di pelosok dunia mempunnyai sedikit peluang atau dengan kata lain memiliki perbandingan yang sangat kecil dari pada kaum laki-laki.

Menurut sumber BPS; Statistik Kesejahteraan Rakyat dari tahun 1999-2002, kaum perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki dalam hal pendidikan. Kondisi ini antara lain disebabkan adanya pandangan dalam masyarakat yang mengutamakan dan mendahulukan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan dari pada perempuan.

Ketertinggalan perempuan dalam bidang pendidikan tercermin dari persentase perempuan buta huruf (14,54% tahun 2001) lebih besar dibandingkan laki-laki (6,87%), dengan kecenderungan meningkat selama tahun 1999-2000. Tetapi pada tahun 2002 terjadi penurunan angka buta huruf yang cukup signifikan. Namun angka buta huruf perempuan tetap lebih besar dari laki-laki, khususnya perempuan kepala rumah tangga. Angka buta huruf perempuan pada kelompok 10 tahun ke atas secara nasional (2002) sebesar 9,29% dengan komposisi laki-laki 5,85% dan perempuan 12,69% (Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat 1999-2002).

Rendahnya kualitas hidup perempuan Indonesia terlihat pada beberapa aspek diantaranya adalah pada aspek pendidikan. Fakta menunjukkan rendahnya angka partisipasi perempuan di jenjang pendidikan tinggi, yakni kurang dari 5%. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat disparitas (ketidakseimbangan) gendernya. Data lainnya adalah angka buta huruf di kalangan perempuan masih sangat tinggi: kurikulum serta materi bahan ajar masih sangat bias gender; dan hampir seluruh proses pengelolaan pendidikan masih dirumuskan berdasarkan

⁷ Banyaknya gambar dalan buku / bahan ajar yang ada di SMP-SMA bahkan juga ditemukan beberapa uraian yang terkesan menjadikan perempuan sebagai kaum pemasak, kaum yang cukup hanya di kasur atau di belakang. Terkesan seluruh wanita adalah kaum bodoh, kaum pinggiran. Itu terdapati di beberapa buku bahan ajar di SMP dan SMA yang ada di berbagai daerah. Hal itu bisa di cek dan dikomentasi lebih lanjut.

pandangan yang male bias sebagai akibat dari masih dipegangnya sebagian besar penentu kebijakan pendidikan oleh laki-laki.⁸

Sebagai bukti bahwa pemegang kebijakan dalam bidang pendidikan lebih di dominasi laki-laki dibandingkan perempuan dapat dilihat pada perbandingan dari setiap 100 guru SD, 54 orang adalah perempuan dan dari 100 guru sekolah menengah, 38 orang di antaranya adalah perempuan. Sementara itu tenaga dosen lebih dominan laki-laki, dari 100 dosen hanya 29 orang adalah perempuan. Tentu dengan melihat kondisi yang demikian terutama dari sedikitnya pengajar perempuan jika dibandingkan laki-laki, maka wajar jika bahan ajar yang ada pada pendidikan agama boleh jadi sangat bias gender, terutama jika para penulis buku bahan ajar adalah laki-laki.

Ada kecenderungan siswa perempuan lebih banyak dari pada lakilaki untuk masuk ke madrasah. Kenyataan ini sesungguhnya banyak mengandung muatan yang berkaitan dengan ideologi gender yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan hanyalah sebagai "penjaga moral", maka dengan sendirinya banyak anak perempuan yang dimasukkan ke madrasah yang selama ini dikenal sebagai salah satu jenjang pendidikan yang bernuasa agama atau memberikan pendidikan keagamaan lebih besar dibandingkan sekolah umum.

Sementara untuk anak laki-lakinya dipilihkan sekolah umum dengan harapan setelah menyelesaikan sekolahnya dapat dengan mudah memperoleh pekerjaan hal ini sesuai dengan konstruksi masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga yang berkewajiban mencari nafkah.

Jika dianalisa lebih mendalam sesungguhnya ketika orang tua lebih banyak yang memasukkan anak perempuannya ke Madrasah Aliyah dibandingkan anak yang laki-laki, hal ini juga dikarenakan berkembangnya ideologi gender di masyarakat yang menganggap peran perempuan

 $^{^{8}}$ Musdah Mulia, Menggagas Kurikulum Yang berperspektif Gender (Jakarta : Jurnal Inovasi, Vol VI/ No .01/ 2003), 22.

 $^{^9}$ Sumber EMIS (Education Management Information System) Departemen Agama.

lebih banyak dalam ranah domestik (rumah tangga), karena itu dengan sendirinya perempuan dituntut untuk menjadi ibu dan isteri yang baik dengan kriteria antara lain; patuh dan taat kepada suami dan menjadi pelayan yang baik bagi anak dan suaminya. Dengan kata lain tugas mulia perempuan adalah —menjaga tatanan moral-Keluarga.

Dalam kehidupan bersama perempuan menjadi kelompok yang di nomor duakan, dianggap tidak penting baik oleh lingkungan keluarga, lingkungan sosial maupun oleh masyarakat dan lembaga pendidikan. Transfer nilai-nilai tentang bagaimana perempuan harus berprilaku, apa yang baik untuk perempuan menjadi sangat jelas, dalam budaya masyarakat yang juga tercermin melalui materi pelajar yang diberikan dan kurikulum yang mencerminkan budaya patriarki.

Ketika konstruksi sosial dan struktur politik secara zalim meminggirkan perempuan, maka pemihakan terhadapnya merupakan sebuah keniscayaan sebagai wujud pembelaan terhadap orang-orang lemah [almustadh'afin] dan perjuangan melawan kezaliman. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyatakan bahwa menyatakan keadilan di hadapan struktur yang zalim adalah sebaik-baik jihad; "Afdhal al-jihâd kalimat 'adlin 'inda sulthânin jâ'ir" (Riwayat Turmudzi dan Abu Dawud, lihat Ibn al-Atsîr, juz I, 236).

Selama ini ilmu pengetahuan telah dikuasai oleh bentuk pengetahuan dan bahasa patriarkal. Akibatnya, pola pemikiran yang terbentuk lebih terfokus pada ilmu pengetahuan yang positivistik, mengarah pada pengobjekan pengetahuan. Ada usaha dikotomis dalam pengetahuan (benar – salah dalam mencari kebenaran). Efek dari pola pengetahuan semacam ini terlihat pada saat individu masuk dalam masyarakat.

Segalanya dipandang pada skala ekstrem: benar –salah; hitam– putih; perempuan– laki-laki. Bahasa pun terdikotomi semacam itu, sehingga dalam membentuk budaya, nilai-nilai dalam masyarakat ataupun hukum yang berlaku tidak memandang manusia sebagai subjek, tetapi lebih melihat manusia sebagai objek untuk dianalisis. Masalah bahasa ini pun semakin rumit ketika perempuan dimasukkan sebagai bagian dari masyarakat.

Mengingat para pelaku dalam masyarakat adalah laki-laki, perempuan pun semakin diobjekkan dengan tidak memiliki kesempatan untuk membahasakan pengalamannya. Perempuan dipaksa untuk mengikuti aturan yang sudah ada. Segala bentuk pengaturan pun dibuat untuk perempuan, termasuk menentukan tubuh dan identitasnya.

Karena itu pendidikan yang ramah gender harus diajarkan baik kepada perempuan maupun laki-laki. Pendidikan ini tidak hanya dimulai dari pendidikan formal seperti sekolah, melainkan harus dimulai juga dari pengasuhan di keluarga. Usaha untuk membongkar bahasa ayah (bahasa patriarkal) harus dimulai dari pengenalan identitas ibu.

Memakai teori dari Julia Kristeva, yakni mengenai *maternity*, ¹⁰ sebagai bagian utama dalam bahasa Kristeva sebagai jembatan antara alam dan budaya. Identitas seorang ibu merupakan hal yang paling penting dalam proses subjek dan kesadarannya. Tubuh ibu menjamin keberlangsungan kehidupan spesies. Ketika seorang ibu kehilangan identitasnya anak tidak akan pernah ada.

Identitas anak ini akan muncul justru ketika si ibu sadar akan identitasnya sendiri. Kristeva kemudian mengenalkan istilah *abjection*, yang merupakan sebuah bentuk penolakan terhadap yang marginal, baik individu maupun kelompok. Karena itulah, teori ini sangat tepat untuk menjelaskan kembali identitas perempuan yang ditolak oleh masyarakat patriarkal.

Ketika identitas perempuan telah diakui, usaha pembongkaran bahasa patriarkal pun dapat dimulai. Berbagai interpretasi terhadap realitas sosial pun dapat dimengerti oleh perempuan karena bahasa masyarakat telah menerima pengalaman perempuan. Adanya kesepakatan semacam inilah yang memudahkan sebuah kurikulum pendidikan yang ramah gender sehingga perempuan dan laki-laki pun akan memiliki akses yang sama dalam menerima pengetahuan. Pada akhirnya, sebuah perombakan paradigma memerlukan kerja sama yang solid dari semua elemen-

¹⁰ Julia Kristeva, "Stabat Mater". Feminist Social Thought. Ed. Diana Tietjens Meyer (New York: Routledge, 1997), 300.

nya. Tidak hanya satu pihak, melainkan semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk memutuskan rantai kekerasan terhadap perempuan.

Kesetaraan dan keadilan gender belum sepenuhnya dapat diwujudkan, karena masih kuatnya nilai-nilai sosial budaya yang bersifat parthiarkhis, yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Keadaan seperti ini diantaranya disebabkan oleh kualitas perempuan yang jauh masih tertinggal terutama dalam bidang tenaga kerja, pendidikan, hukum, pertanian, kesehatan, ekonomi/koperasi dan kesehatan, yang berpotensi besar mempengaruhi rendahnya kualitas generasi penerusnya.

Diskriminasi terhadap kaum perempuan masih terasa dampaknya sampai saat ini, terutama perempuan yang ada di pedesaan atau yang dimarjinalkan dalam bidang tenaga kerja, pendidikan, hukum, pertanian, kesehatan, ekonomi/koperasi dan kesehatan. Mereka tidak memiliki akses, kesempatan, wawasan dan kontrol atas pembangunan serta tidak memperoleh manfaat dan pengembangan yang adil dan setara dengan laki-laki.

Disamping itu ketidaktepatan pemahaman agama sering menyudutkan kedudukan dan peranan perempuan dalam masyarakat. Keadaan seperti ini perlu segera diperbaiki, dengan landasan pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan gender yang sejalan dengan nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat, serta dilandasi dengan pemahaman dan interpretasi ajaran agama yang baik dan benar.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan dan keadilan gender, sehingga berbagai ketimpangan (bias gender) yang telah lama ada dapat segera teratasi. Salah satu alternatif gender pada mata pelajaran yang ada kaitannya pada program-program Pendidikan Luar Sekolah.

Materi keadilan dan kesetaraan gender dapat dikembangkan secara menyatu dengan cara disisipkan pada mata pelajaran oleh tutor satuan Pendidikan Luar Sekolah, karena tutor bertugas sebagai pengajar/pemberi materi juga kewenangan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang ada.

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidak adilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaran dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.

Adapun pengembangan yang kedua seorang tutor hendaknya menerapkan perilaku yang berprespektif gender dalam setiap tahapan proses pembelajaran baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam pelaksanaan di lapangan para tutor satuan program tersebut sangat membutuhkan buku panduan, sebagai acuan/rujukan untuk mengembangkan kurukulum yang bermuatan keadilan dan kesetaraan gender, sehingga penyusunan panduan pengembangan materi dan metodologi gender dalam proses pembelajaran satuan program tersebut sangat dibutuhkan.

Pendidikan adalah wilayah yang tepat untuk melakukan pembelaan terhadap perempuan dan perjuangan menegakkan nilai-nilai keadilan, terutama bagi perempuan. Pendidikan merupakan alat utama untuk melakukan transformasi sosial. Melalui pendidikan, orang bisa mengenal kemampuan dan kekuatan dirinya, didorong mempertanyakan berbagai asumsi, terus menerus mencari kebenaran, belajar mengartikulasikan dan memperjuangkan kebenaran.

Pendidikan akan menjadi basis kekuatan sosial dan politik perempuan. Namun sayang, masih saja ada penelikungan terhadap kaum perempuan yang mungkin saja jarang dirasa meskipun berefek begitu besar dan hal itu terdapat pada bentuk dan sistem pembuatan modul atau bahan ajar pendidikan agama.

III. Bias Gender dalam Buku Ajar Pendidikan Agama

Terdapat beberapa bagian yang bias gender dalam kurikulum agama Islam di antaranya pada materi aqidah-akhlaq dan fiqh-ibadah. Sebagai contoh dalam buku ajar agama Islam untuk kelas 4 SD,bab XIV tentang "Iman kepada Rasul-rasul Allah," dijelaskan bahwa "pengertian Nabi ialah seorang manusia biasa (laki-laki) yang menerima wahyu dari Allah Swt. Untuk dirinya sendiri. Rasul ialah seorang manusia biasa (laki-laki) yang diutus oleh Allah dan menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya".

Selain itu, dalam buku-buku ajar agama Islam untuk baik untuk SD ataupun MI kelas 1-3, kisah-kisah Nabi dan Rasul diceritakan hanya kisah Nabi dan Rasul dari kaum laki-laki saja.¹¹ Hal senada juga dapat dilihat pada tema Profil tokoh di dalam buku ajar SMP kelas 3 terbitan Ganeca juga pada tema sepenggal kisah atau kisah Islami dalam buku ajar SD Kelas 1-6 terbitan Erlangga. Di dalam dua buku terakhir terdapat profil

¹¹ Tim KKG PAI, Integrasi Budi Pekerti dalam Pendidikan Agama Islam untuk SD kelas 4 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),125.

tokoh yang dikisahkan lebih banyak pada gambaran ketokohan dan ketauladanan seorang laki-laki dibandingkan perempuan.¹²

Dari teks di atas dapat dipahami bahwa yang dapat menjadi nabi dan rasul hanyalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, sedangkan perempuan tidak dapat menjadi seorang nabi dan rasul. Bias Gender yang lain dalam buku ajar Agama Islam juga terdapat dalam bentuk gambar dimana dalam topik Takabur (sombong) digambarkan sekelompok perempuan yang sedang membicarakan seorang perempuan yang sombong.

Secara implisit ilustrasi gambar yang diberikan juga telah menumbuhkan dan membangun bias gender bagi yang membaca ataupun melihatnya dimana perempuan akan diidentikan dengan sosok yang suka mengunjing, menggosip dan sebagainya. Hal senada juga dapat dilihat pada bahasan rukun iman dimana terdapat satu keluarga yang sedang beraktifitas; sosok anak laki-lakinya digambarkan sedang belajar, ayahnya sedang melihat pemandangan, sementara si Ibu memasak di dapur. Banyak fenomena bias jender pada bahan ajar pendidikan agama Islam baik mulai dari SD/MI sampai Perguruan Tinggi yang jarang diperbincangkan karena sudah dikira baik.

Selain melalui gambar, bias gender juga dapat terlihat pada ungkapan ataupun narasi kalimat dalam uraian materi. Dalam uraian pokok bahasan adab makan dan minum, terdapat kalimat," kemudian bantulah ibumu membereskan meja makan' dengan ilustrasi gambar adegan keluarga yang selesai makan,si Ibu dan anak perempuan membereskan peralatan makan, sementara ayah dan anak laki-lakinya sedang berbincang-bincang. Hal ini jelas sekali menunjukkan domestifikasi pekerjaan perempuan.

Banyak uraian dari kalimat pembelajaran yang ada di bahan ajar pendidikan agama Islam mensosialisikan domestifikasi pekerjaan perempuan dalam rumah tangga. Sementara itu dalam tema-tema tentang wudu, misalkan, atau tema salat berjama'ah (fiqih), mayoritas gambar yang dibuatnya adalah gambar laki-laki. Penggambaran ini tentunya sangat

 $^{^{\}rm 12}$ New Teaching Resources, Pendidikan Agama Islam SD untuk kelas I-VI (Jakarta: Esis Erlangga, 2004), 38.

bernuasa bias gender karena kewajiban pelaksanaan dan praktek ibadah (fiqih) tidak hanya dibebankan kepada laki-laki tetapi juga bagi perempuan.

Masih banyak ilustrasi gambar dalam buku ajar Agama Islam khususnya pada tingkat SD/MI, mayoritas ilustrasi gambar yang digunakan dalam berwudhu, tayammum serta cara pelaksanaan 13 rukun salat tidak satupun terlihat yang mengikutsertakan gambar perempuan. Dalam Salat Berjama'ah juga mayoritas gambar yang dibuat lebih banyak kelompok laki-laki hanya sedikit yang mengikut sertakan gambar perempuan dalam tema salat berjama'ah

Persoalan bias gender kedua dalam masalah fiqih, yang lain adalah tentang salat jama'ah, munakahat, udhiyah dan mawarits. Dalam buku pendidikan Agama Islam untuk tingkat SD, misalkan, tentang Shalat jama'ah, dijelaskan bahwa ketentuan menjadi imam, yaitu: laki-laki mengimami laki-laki-laki; laki-laki mengimami perempuan; perempuan mengimami pertempuan; laki-laki mengimami khunsta (banci); atau banci mengimami perempuan.

Hal senada juga terdapat dalam buku Integrasi Budi Pekerti dalam Pendidikan Agama Islam untuk kelas 1 SLTP, tentang salat berjama'ah, dijelaskan bahwa syarat-syarat menjadi imam, yaitu; sehat akalnya; harus baik dan benar bacaannya; harus laki-laki tidak boleh perempuan menjadi imam laki-laki; lebih tua umurnya; hendaknya memiliki pengetahuaan yang memadai, khususnya tentang salat berjama'ah.¹³

Dalam buku Integrasi Budi Pekerti dalam Pendidikan Agama Islam untuk kelas 1 SLTP, tentang munakahat, dijelaskan bahwa "dalam ajaran Islam tidak ada larangan seorang laki-laki beristri sampai batas empat. Akan tetapi, untuk melaksanakan hal itu harus dapat memenuhi syarat-syarat yang sangat berat, yaitu bisa berlaku adil dalam mengatur kebutuhan tiap-tiap istri". Dasar hukum yang digunakan adalah surah An-Nisa: 3. Selain itu, dijelaskan bahwa salah satu alasan boleh melakukan poligami adalah untuk menghindarkan seorang laki-laki melakukan

¹³ Ahmad Syafi'i Mufid, Integrasi Budi Pekerti dalam Pendidikan Agama Islam untuk kelas 1 SLTP (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 66.

perzinahan, karena istrinya dalam keadaan sakit yang menahun dan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

Begitu juga tentang udhiyah, dijelaskan bahwa, "aqiqah untuk anak laki-laki adalah dua ekor kambing dan anak perempuan sebanyak satu ekor kambing. Dari teks ini dipahami bahwa adanya diskriminasi terhadap anak, yaitu harga anak laki-laki dua kali lipat harga anak perempuan. Terdapat bias gender di sana.

Dalam buku Integrasi Budi Pekerti dalam Pendidikan Agama Islam untuk kelas 3 SMU, mengenai mawarits, dijelaskan bahwa "bagian satu anak laki-laki dua kali lipat bagian satu anak perempuan ketentuan mawarits ini didasarkan pada surah an-Nisa ayat 11 bahwa "Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.¹⁴

Dari teks di atas, dapat dipahami bahwa harga seorang perempuan itu hanya setengah seorang laki-laki. Sementara itu menurut Huzaemah Tahido Yanggo dalam melihat *Asbab an-nuzul* ayat ini menyatakan bahwa hal ini menunjukkan Islam bertujuan meningkatkan hak dan derajat perempuan, pada satu sisi. Pada sisi yang lain, menunjukkan adanya kesejajaran dalam perolehan hak kewarisan, perempuan tidak selalu mendapatkan setengah dari bagian laki-laki. 15

Dalam upaya mewujudkan pemahaman keagamaan yang bersifat gender, maka sudah selayaknya diperlukan revisi terhadap hal-hal yang bias gender dalam buku ajar Agama Islam tersebut. Revisi ini menjadi penting dikarenakan pemahaman keagamaan yang bias ini jusru menjadi pemahaman mayoritas di masyarakat. Kenyataan ini dilatarbelakangi karena umat Islam memahami ajaran agamanya secara dogmatis dan bukan berdasarkan penalaran yang kritis khususnya pengetahuan agama yang menjelaskan peran dan kedudukan perempuan.

¹⁴ Ahamad Syafi'i Mufid, Integrasi Budi Pekerti dalam Pendidikan Agama Islam untuk kelas 3 SMU (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 99.

¹⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, 'Pandangan Islam tentang Gender, 'dalam Mansour Faqih, Membincang Feminisme: Diskursus Gender Persfektif Islam, cet. I (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 155.

Perlu ditekankan pula penyadaran tentang nilai-nilai pendidikan yang berperspektif gender kepada semua pihak khususnya para pengarang dan editor buku tentang kenyataan bahwa kurikulum yang ada tidak netral gender artinya disusun dan dirumuskan dengan sudut pandang lakilaki sehingga mereka tidak lagi membuat gambar ataupun narasi bahan ajar agama yang bias gender. Sementara itu, bagi para guru agama dituntut untuk lebih kritis dan sensitif dalam menelaah dan mencermati segala hal yang terkait dengan ketimpangan gender dalam proses pembelajaran yang berlangsung dalam kerja kesehariannya.

Memastikan anak-anak perempuan dan lelaki mendapat peluang pendidikan yang sama merupakan satu langkah yang penting di dalam perjuangan menentang diskriminasi gender. Bahan ajar pendidikan agama atau mungkin juga kurikulum sekolah juga mestilah menekankan kepentingan kesaksamaan gender baik untuk guru-guru maupun pelajar-pelajar, dan juga membincangkan tentang kelebihan yang selalu diberikan kepada lelaki di dalam kelas. Salah satu cara untuk membantu menghapuskan kelebihan yang diberikan kepada lelaki ialah dengan meningkatkan bilangan guru-guru wanita di dalam kelas.

Tidak dapat diingkari bahwa banyak ketentuan hukum Islam yang membedakan norma hukum untuk laki-laki dan perempuan. Namun perbedaan tersebut tidak bersifat kodrati dengan mengacu pada faktor biologis manusia (jenis kelamin). Itulah mengapa, seharusnya perbedaan yang kemudian dibakukan dalam beragam norma hukum dan sosial yang ada selama ini lebih dipandang sebagai akibat dari upaya masing-masing individu manusia berdialektis dalam 'proses menjadi" atau bereksistensi, mewujudkan kehidupan relasi gender yang berkeadilan di hadapan Tuhan dalam kedudukannya sebagi khalifah Tuhan di bumi.

IV. Kesimpulan

Tidak bisa disangkal bahwa meskipun pemerintah dari dulu menggelontorkan puluhan juta untuk memberikan program-program pendidikan yang adil atau dengan bahasa lain adil gender, namun tetap

saja di lapangan terbukti lain, yaitu makin seburnya bias gender. Beberapa kesimpulan sementara dari tulisan ringkas ini adalah

Pertama, dari sekian pembacaan yang ada di beberapa bahan ajar pendidikan agama Islam, ditemukan masih banyak beberapa uraian yang terkesan menjadikan perempuan termasuk kaum pinggiran, kaum bodoh, kaum yang cukup menempati atau bergelut dengan dapur, kasur dan fenomena-fenomena yang mensubordinat lainnya.

Kedua, kurikulum agama semakin mengarah dan memberikan kecenderungan bias gender. Salah satu sebab adalah dikarenakan para penulis buku menganggap kitab-kitab agama termasuk fiqih yang menjadi rujukkannya sebagai sesuatu yang final, sakral tidak bisa diubah. Banyak dari kaum perempuan atau dengan bahasa lain simbol perempuan yang ada di beberapa buku ajar agama cenderung disubordinat.

Ketiga, sudah saatnya diperlukan revisi terhadap hal-hal yang bias gender dalam buku ajar Agama Islam. Revisi ini menjadi penting dikarenakan pemahaman keagamaan yang bias justru menjadi pemahaman mayoritas di masyarakat. Kenyataan ini dilatar belakangi karena umat Islam memahami ajaran agamanya secara dogmatis dan bukan berdasarkan penalaran yang kritis khususnya pengetahuan agama yang menjelaskan peran dan kedudukan perempuan yang teraplikasikan dalam beberapa bahan ajar agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, Mohammad Yasir. dkk. Advokasi Hak-hak Perempuan : Membela Hak Mewujudkan Perubahan, cet.I. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Cleves Mosse, Julia. Gender & Pembangunan. Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Centre dan Pustaka Pelajar, 1996.
- EMIS (Education Management Information System) Departemen Agama.
- Faqih, Mansour. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Kristeva, Julia. "Stabat Mater". Feminist Social Thought. Ed. Diana Tietjens Meyer. New York: Routledge, 1997.
- Mas'udi, Masdar. F. "Perempuan dalam Wacana Keislaman", dalam Smita Notosutanto dan E. Kristi Poerwandari, *Perempuan dan Pemberdayaan*: Kumpulan Karangan untuk Menghormati Ulang tahun ke –70 Ibu Saparinah Saalli, cet. I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Mufid, Ahmad Syafi'i. Integrasi Budi Pekerti dalam Pendidikan Agama Islam untuk kelas 1 SLTP. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- _____. Integrasi Budi Pekerti dalam Pendidikan Agama Islam untuk kelas 3 SMU. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- . (ed), Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam), Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama. Departemen Agama, 2001.
- ____. Menggagas Kurikulum Yang berperspektif Gender. Jakarta : Jurnal Inovasi, Vol VI/ No .01/ 2003.
- _____. Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan. Jakarta: Mizan, 2004.
- Mustofa. "Reinterpretasi Menstrual Taboo dalam Al-Qur'an: Menggagas Fiqih Egalitas-Humanis", dalam *Jurnal Musawa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 5, No. 1, Januari 2007.
- New Teaching Resources. *Pendidikan Agama Islam SD untuk kelas I-VI.* Jakarta: Esis Erlangga, 2004.

- Ricklander, Louise. "Women and Politics", dalam Women at work Psychological and Organizaational Perspective, ed. Michael A. West. Philadelphia: Open University Press, 1993.
- Tim Abdi Guru. Ayo Belajar Agama Islam untuk SMP kelas VII. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Tim KKG PAI. Integrasi Budi Pekerti dalam Pendidikan Agama Islam untuk SD kelas 4. Jakarta; Ghalia Indonesia, 2002.
- Umam, Cholil, dkk. Pendidikan Agama Islam untuk SD Kelas 3, Sidoarjo: Duta Aksara, 2003.
- Wahid, Achmadi, dan Masrun. *Pendidikan Agama Islam untuk SMP kelas* 3, Jakarta: Ganeca Exact, 2005.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. "Pandangan Islam tentang Gender", dalam Mansor Faqih, Membincang Feminisme: Diskursus Gender Persfektif Islam, cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

